Analisis Kritik Statistik Pengangguran Standar ILO dan Realitas Kesejahteraan di Indonesia (2026)

1. Kritik Terhadap Standar Ketenagakerjaan ILO

Standar International Labour Organization (ILO) dalam mengukur tingkat pengangguran dinilai terlalu sempit dan kurang relevan jika disandingkan dengan realitas inflasi serta stagnasi pendapatan riil masyarakat modern. Kesenjangan antara angka resmi dan kenyataan di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor mendasar:

- **Definisi 'Bekerja' yang Terlalu Longgar:** Seseorang dikategorikan 'bekerja' hanya dengan melakukan aktivitas ekonomi minimal 1 jam dalam seminggu. Metrik ini gagal mencerminkan kemampuan finansial untuk bertahan hidup di tengah lonjakan harga pokok.
- **Mengabaikan Setengah Pengangguran (Underemployment):** Gagal menangkap skala penuh dari pekerja paruh waktu terpaksa dan ketidaksesuaian kualifikasi (mismatch), seperti lulusan sarjana yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan di bawah potensi mereka.
- **Abaikan Dampak Daya Beli:** Statistik biner (bekerja/menganggur) tidak mencerminkan daya beli riil yang tergerus oleh inflasi pangan dan energi.
- **Kesenjangan dengan Rata-Rata Pendapatan:** Angka statistik pengangguran rendah dapat memberikan ilusi ekonomi sehat, meskipun terjadi fenomena 'working poor' akibat upah yang stagnan.

2. Kontradiksi Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Di Indonesia, kritik teoritis tersebut terbukti nyata melalui data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026. Terjadi anomali di mana tingkat pengangguran formal menurun, namun beban kesejahteraan masyarakat justru semakin nyata:

Indikator Ketenagakerjaan (BPS Agustus 2026)	Kondisi / Realitas Riil Lapangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Turun menjadi 4,75% (tersisa 7,38 juta orang penganggur terbuka).
Pekerja Setengah Pengangguran	Membengkak mencapai 12,8 juta orang (jam kerja tidak optimal namun tidak dihitung penganggur).
Dominasi Sektor Informal	Meningkat hingga 57,93%, menunjukkan penyusutan lapangan kerja formal.

3. Dampak Tekanan Inflasi Terhadap Pendapatan Riil

Penurunan angka statistik pengangguran di Indonesia tidak berbanding lurus dengan

peningkatan kesejahteraan akibat terjadinya penurunan daya beli riil masyarakat. Hubungan matematis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kenaikan Gaji Rata-Rata (2,7%) < Laju Inflasi Tahunan (3,23%) = Pertumbuhan Daya Beli Minus (-0,53%)

- **Erosi Upah oleh Inflasi Pangan:** BPS mencatat inflasi tahunan hingga Oktober 2026 mencapai 3,23% (yoy) yang didominasi oleh kelompok pangan pokok. Biaya konsumsi dasar naik tajam.
- **Stagnasi Pendapatan:** Rata-Rata upah buruh nasional hasil Sakernas hanya meningkat sebesar 2,7% (menjadi Rp3,42 juta/bulan). Ketertinggalan pertumbuhan upah dari inflasi secara otomatis menggerus take-home pay riil pekerja.
- **Kerentanan Sektor Utama:** Pada sektor padat karya seperti pertanian dan perdagangan eceran, rata-rata upah riil berada jauh di bawah rata-rata nasional (berkisar Rp2,24 juta hingga Rp2,94 juta per bulan), menjadikan kelompok ini yang paling terdampak.

Kesimpulan & Indikator Alternatif

Angka pengangguran standar ILO cenderung memberikan 'ilusi optik' bahwa perekonomian dalam kondisi prima. Untuk penilaian ketenagakerjaan yang lebih jujur di Indonesia, pembuat kebijakan dan analis wajib beralih pada metrik alternatif seperti Underemployment Rate, Real Wage Growth, dan Misery Index (gabungan tingkat pengangguran dan inflasi).